



**PEMERINTAH
KABUPATEN
KAPUAS HULU**

**KAPUAS HULU
HEBAT!**

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, sehingga dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, sebagai tindak lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, disusun berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Dinas memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, diharapkan dengan tersusunnya Renja ini dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Putussibau, Februari 2024

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kapuas Hulu



HASINTUS GUNUNG AGUNG, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19830705 201001 1 023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 2

 1.3. Maksud Dan Tujuan 4

 1.4. Sistematik Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.. 8

 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
 Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
 Daerah 19

 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 20

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 37

BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 38

 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 38

 3.2. Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah 38

 3.3. Program dan Kegiatan 41

BAB IV PENUTUP..... 59

DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Kapuas Hulu	9
2.2	Tabel Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3	Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
3.1	Tabel Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu	40
3.2	Tabel Program dan Kegiatan	44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diperkuat dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif. Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2024. Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024. Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Pangan nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pertanian Berangkat dari pemikiran di atas, maka secara substansial kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024 tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut :

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target - target yang telah ditetapkan. Artinya, apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumber daya yang



dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dan pangan dapat lebih optimal.

2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pernyataan tersebut dapat diartikan, bahwa pembangunan pertanian dan pangan dilaksanakan untuk meningkatkan produksi pertanian dan pangan untuk memenuhi ketersediaan pangan. Pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan pada tahun sebelumnya yang masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing dan ketersediaan pangan pada tahun 2023 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2024.
3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.
4. Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026, oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2021 – 2026 dan sebagai tindak lanjut dari RKPD tahun 2024 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2021 – 2026.

Kedudukan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh kebijakan publik.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun.
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah bersama DPRD.

Penyusunan Renja OPD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Pertanian dan Pangan yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011– 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan



- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 -2026;
 21. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu;
 22. Draf usulan program pembangunan pertanian Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.
7. Untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.



1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2024 mengimplementasikan perencanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentaun peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu pada APBD tahun 2023 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun – tahun sebelumnya.



- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah, serta ketentuan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian tentang proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasan temuan – temuan setelah proses perbandingan tersebut dilakukan serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Menguraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan dan instansi lain maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Berisikan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu – isupenting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

1.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tersebut; uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dan rumusan tentang program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.



BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2023 dengan APBD sebesar Rp 41.452.910.909,- yang terdiri dari 10 program, 25 kegiatan dan 60 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 40.512.940.576,- dengan capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 97,73%.

Adapun hasil kinerja program/kegiatan/sub kegiatan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 telah memenuhi target yang direncanakan. Akan tetapi masih terdapat program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dan juga terdapat program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berikut ini disajikan Tabel evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 :



Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
RENJA Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu
Periode Pelaksanaan : Triwulan I - IV Tahun 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD

No	Sasaran	Kode						Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perang kat Daer ah Pena ngg ung Jaw ab						
													I				II		III							IV					
													I	II	III	IV	I	II	I	II						I	II	I	II		
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya Pembedayaan Petani Melalui Peningkatan Produksi	2	0	9	0	3																									Dinas Pertanian dan Pangan
																</															

Halaman | 11



		2	09	03	204		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai AKG	85%	Rp 307.279.832	76%	Rp 131.133.300	78%	Rp 76.010.000	13,72%	Rp 12.487.800	5,49%	Rp 4.999.000	41,38%	Rp 25.183.400	33,99%	Rp 33.123.900	94,58%	Rp 75.794.100	171%	Rp 206.927.400	28%	Rp 34.487.900	Dinas Pertanian dan Pangan
		2	09	03	204	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	30	Rp 307.279.832	15kel	Rp 131.133.300	15Poktan	Rp 76.010.000	15poktan	Rp 12.487.800	15poktan	Rp 4.999.000	15poktan	Rp 25.183.400	15poktan	Rp 33.123.900	15poktan	Rp 75.794.100	30kel	Rp 206.927.400	500%	Rp 34.487.900	Dinas Pertanian dan Pangan
		2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWA NAN PANGAN	Persentase kerawanan pangan yang ditindaklanjuti	100%	Rp 100.332.211	100%	Rp 47.457.600	100%	Rp 26.750.000	-	Rp -	11,68%	Rp 3.125.000	47,98%	Rp 12.834.800	40,07%	Rp 10.719.075	99,73%	Rp 26.678.875	200%	Rp 74.136.475	33%	Rp 12.356.079	Dinas Pertanian dan Pangan
		2	09	04	201		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Laporan Situasi Pangan dan Gizi Tingkat Kecamatan	1	Rp 100.332.211	1dok	Rp 47.457.600	1dok	Rp 26.750.000	-	Rp -	1dok	Rp 3.125.000	1dok	Rp 12.834.800	1dok	Rp 10.719.075	1dok	Rp 26.678.875	2dok	Rp 74.136.475	33%	Rp 12.356.079	Dinas Pertanian dan Pangan



		2	09	04	201	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	Rp 100.332.211	1 dok	Rp 47.457.600	1 dok	Rp 26.750.000	-	Rp -	1 dok	Rp 3.125.000	1 dok	Rp 12.834.800	1 dok	Rp 10.719.075	1 dok	Rp 26.678.875	2 dok	Rp 74.136.475	33 %	Rp 12.356.079	Dinas Pertanian dan Pangan
		2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan segar yang layak konsumsi	86%	Rp 42.647.611	80%	Rp 29.798.800	82%	Rp 28.990.000	8,30 %	Rp 2.935.000	22,86%	Rp 8.082.000	17,18 %	Rp 3.137.000	41,85%	Rp 14.796.450	90,19%	Rp 28.950.450	170 %	Rp 58.749.250	28 %	Rp 9.791.542	Dinas Pertanian dan Pangan
		2	09	05	201		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar daerah layak kosumsi	10 jenis	Rp 42.647.611	7 jenis	Rp 29.798.800	7 Jenis	Rp 28.990.000	7 Jenis	Rp 2.935.000	7 Jenis	Rp 8.082.000	7 Jenis	Rp 3.137.000	7 jenis	Rp 14.796.450	7 jenis	Rp 28.950.450	14 jenis	Rp 58.749.250	233 %	Rp 9.791.542	Dinas Pertanian dan Pangan
		2	09	05	201	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	12	Rp 42.647.611	7 jenis	Rp 29.798.800	7 jenis	Rp 28.990.000	7 jenis	Rp 2.935.000	7 jenis	Rp 8.082.000	7 jenis	Rp 3.137.000	7 jenis	Rp 14.796.450	7 jenis	Rp 28.950.450	14 jenis	Rp 58.749.250	233%	Rp 9.791.542	Dinas Pertanian dan Pangan
2.	Meningkatnya Implementasi Pelak	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	NILAI SAKIP DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	87,5	Rp 16.451.355.093	60,85	Rp 20.599.391.307	88	Rp 20.862.526.909	-	Rp 4.310.121.599	-	Rp 6.479.619.690	-	Rp 4.451.764.962	88	Rp 5.156.583.605	88	Rp 20.398.089.856	60,85	Rp 40.997.481.163	1014 %	Rp 6.832.913.527	Dinas Pertanian dan Pan



sanaa n Refor masi Birok rasi dan Akun tabilit as Kiner ja Dinas Pert anian dan Pang an Kabu paten Kapu as Hulu							DAERAH KABUPAT EN/KOTA																					gan	
								NILAI IKM DINAS PERTAN IAN DAN PANGAN			80		81		-		-		-		81		81		161	Rp -	26 83 %	Rp -	Dina s Pert ania n dan Pan gan
			3	2 7	0 1	2 · 0 1		Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusun nya dokumen Perencan aan Pengangg aran dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	26	Rp 294.7 31.38 3	26	Rp 275.8 67.20 0	26	Rp 301.5 67.83 0	7	Rp 35.85 5.000	9	Rp 74.79 0.800	6	Rp 70.52 5.600	4	Rp 118.5 86.03 5	26	Rp 299.7 57.43 5	52	Rp 575.6 24.63 5	86 7 %	Rp 95.93 7.439
		3	2 7	0 1	2 · 0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	8	Rp 94.91 5.407	8	Rp 83.33 9.200	8	Rp 107.5 02.50 0	3	Rp 24.13 5.000	2	Rp 15.94 8.200	3	Rp 49.01 9.400	0	Rp 18.24 7.650	8	Rp 107.3 50.25 0	16	Rp 190.6 89.45 0	26 7%	Rp 31.78 1.575	Dina s Pert ania n dan Pan gan



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024

		3	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Rp 19.606.349	1	Rp 8.179.000	1	Rp 4.972.000	0	Rp -	1	Rp 4.372.000	0	Rp -	0	Rp 598.000	1	Rp 4.970.000	2	Rp 13.149.000	33 %	Rp 2.191.500	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Rp 7.740.111	1	Rp 5.798.000	1	Rp 7.472.000	0	Rp -	1	Rp -	0	Rp -	0	Rp 7.362.800	1	Rp 7.362.800	2	Rp 13.160.800	33 %	Rp 2.193.467	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Rp 15.776.556	2	Rp 13.206.000	2	Rp 11.447.000	1	Rp -	1	Rp -	0	Rp -	0	Rp 11.214.050	2	Rp 11.214.050	4	Rp 24.420.050	67 %	Rp 4.070.008	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2	Rp 16.053.564	2	Rp 15.182.000	2	Rp 10.982.000	0	Rp -	1	Rp -	0	Rp -	1	Rp 10.552.150	2	Rp 10.552.150	4	Rp 25.734.150	67 %	Rp 4.289.025	Dinas Pertanian dan Pangan



								Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD																					
		3	27	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Rp 37.563.535	4	Rp 57.677.000	4	Rp 41.404.000	1	Rp 11.720.000	1	Rp 19.035.000	1	Rp 4.070.000	1	Rp 6.336.250	4	Rp 41.161.250	8	Rp 98.838.250	133%	Rp 16.473.042	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Rp 103.075.861	8	Rp 92.486.000	8	Rp 117.788.330	2	Rp -	2	Rp 35.435.600	2	Rp 17.436.200	2	Rp 64.275.135	8	Rp 117.146.935	16	Rp 209.632.935	267%	Rp 34.938.823	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44	Rp 14.689.949.534	44	Rp 15.359.411.982	44	Rp 15.625.888.944	44	Rp 3.398.262.834	44	Rp 5.110.399.013	44	Rp 3.353.884.260	44	Rp 3.358.792.870	44	Rp 15.221.338.977	88	Rp 30.580.750.959	1467%	Rp 5.096.791.827	Dinas Pertanian dan Pangan



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024

		3	2	0	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144	Rp 13.96 9.513 .653	144	Rp 14.89 6.055 .582	144	Rp 15.26 8.314 .344	144	Rp 3.323 .012. 834	144	Rp 5.010 .759. 013	14	Rp 3.279 .034. 260	144	Rp 3.251 .962. 285	144	Rp 14.86 4.768 .392	288	Rp 29.76 0.823 .974	48 00 %	Rp 4.960 .137. 329	Dina s Pertanian dan Pangan
		3	2	0	2	0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8	Rp 628.2 47.06 7	12	Rp 402.1 78.40 0	12	Rp 298.4 70.00 0	3	Rp 75.25 0.000	3	Rp 80.79 0.000	3	Rp 74.85 0.000	3	Rp 67.08 0.000	12	Rp 297.9 70.00 0	24	Rp 700.1 48.40 0	40 0%	Rp 116.6 91.40 0	Dina s Pertanian dan Pangan
		3	2	0	2	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp 46.15 1.419	1	Rp 28.61 8.400	1	Rp 27.40 7.800	0	Rp -	0	Rp 9.205 .000	0	Rp -	1	Rp 17.97 6.820	1	Rp 27.18 1.820	2	Rp 55.80 0.220	33 %	Rp 9.300 .037	Dina s Pertanian dan Pangan
		3	2	0	2	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	Rp 46.03 7.395	1	Rp 32.55 9.600	1	Rp 31.69 6.800	0	Rp -	0	Rp 9.645 .000	0	Rp -	1	Rp 21.77 3.765	1	Rp 31.41 8.765	2	Rp 63.97 8.365	33 %	Rp 10.66 3.061	Dina s Pertanian dan Pangan



								teran SKPD																					
		3	2 7	0 1	2 · 0 3		Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusun nya dokumen Administra si Barang Milik Daerah pada Perangka t Daerah	6	Rp 106.7 99.70 1	6	Rp 40.70 5.000	7	Rp 90.14 2.000	2	Rp 7.925 .000	0	Rp -	1	Rp 43.14 0.000	5	Rp 38.53 7.000	7	Rp 89.60 2.000	13	Rp 130.3 07.00 0	21 7 %	Rp 21.71 7.833	Dina s Pert ania n dan Pan gan
		3	2 7	0 1	2 · 0 3	0 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengaman an Barang Milik Daerah SKPD	1	Rp 54.50 0.000	0	Rp -	1	Rp 78.45 0.000	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 43.14 0.000	1	Rp 34.91 5.000	1	Rp 78.05 5.000	1	Rp 78.05 5.000	17 %	Rp 13.00 9.167	Dina s Pert ania n dan Pan gan
		3	2 7	0 1	2 · 0 3	0 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalia n Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaa n, Pengawas an, dan Pengendal ian Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Rp 12.38 6.432	4	Rp 32.11 5.000	4	Rp 6.157 .000	1	Rp 4.035 .000	0	Rp -	0	Rp -	3	Rp 2.122 .000	4	Rp 6.157 .000	8	Rp 38.27 2.000	13 3%	Rp 6.378 .667	Dina s Pert ania n dan Pan gan
		3	2 7	0 1	2 · 0 3	0 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsilia si dan Penyusuna n Laporan Barang Milik	2	Rp 39.91 3.269	2	Rp 8.590 .000	2	Rp 5.535 .000	1	Rp 3.890 .000	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 1.500 .000	2	Rp 5.390 .000	4	Rp 13.98 0.000	67 %	Rp 2.330 .000	Dina s Pert ania n dan Pan gan



								Daerah pada SKPD																					
																					-								
		3	27	01	205		Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	Tersusun nya dokumen Administ rasi Kepegaw aian Perangka t Daerah	5	Rp 33.87 3.418	6	Rp 51.89 4.000	8	Rp 111.7 48.88 0	1	Rp 9.535 .000	2	Rp 22.38 0.000	2	Rp 9.675 .000	1	Rp 69.09 2.855	8	Rp 110.6 82.85 5	14	Rp 162.5 76.85 5	23 3 %	Rp 27.09 6.143	Dina s Pert ania n dan Pan gan
		3	27	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia n	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolaha n Administ rasi Kepegawa ian	5	Rp 33.87 3.418	6	Rp 51.89 4.000	6	Rp 80.03 0.000	1	Rp 9.535 .000	2	Rp 22.38 0.000	2	Rp 9.675 .000	1	Rp 37.38 7.055	6	Rp 78.97 7.055	12	Rp 130.8 71.05 5	20 0%	Rp 21.81 1.843	Dina s Pert ania n dan Pan gan
		3	27	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolaha n Administ rasi Kepegawa ian	2	Rp 54.02 4.558	0	Rp -	2	Rp 31.71 8.880	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 31.70 5.800	2	Rp 31.70 5.800	2	Rp 31.70 5.800	33 %	Rp 5.284 .300	Dina s Pert ania n dan Pan gan
		3	27	01	206		Administra si Umum Perangkat Daerah	Terlaksan anya pelayanan administr asi umum perangkat daerah	15	Rp 531.6 48.67 7	31	Rp 1.063 .904. 610	31	Rp 1.231 .862. 921	3	Rp 141.3 95.50 0	11	Rp 429.9 58.30 0	14	Rp 289.2 18.82 1	13	Rp 370.5 76.00 0	31	Rp 1.231 .148. 621	62	Rp 2.295 .053. 231	10 33 %	Rp 382.5 08.87 2	Dina s Pert ania n dan Pan gan



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024

		3	2	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene- rangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediaka n	2	Rp 20.34 3.962	1	Rp 12.98 6.000	1	Rp 54.46 2.721	0	Rp -	1	Rp 3.605 .000	1	Rp 50.65 7.721	1	Rp -	1	Rp 54.26 2.721	2	Rp 67.24 8.721	33 %	Rp 11.20 8.120	Dina s Pert ania n dan Pan gan
		3	2	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengka- pan Kantor yang Disediaka n	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka- pan Kantor yang Disediaka n	1	Rp 20.34 3.962	1	Rp 145.1 80.23 0	1	Rp 135.4 58.80 0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 135.2 95.00 0	1	Rp -	2	Rp 145.1 80.23 0	33 %	Rp 24.19 6.705	Dina s Pert ania n dan Pan gan
		3	2	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n	1	Rp 66.15 0.088	1	Rp 49.50 3.000	1	Rp 33.40 5.400	1	Rp 2.646 .000	1	Rp 5.724 .400	1	Rp 828.0 00	1	Rp 24.20 6.200	1	Rp 9.198 .400	2	Rp 58.70 1.400	33 %	Rp 9.783 .567	Dina s Pert ania n dan Pan gan
		3	2	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda n	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda n yang Disediaka n	2	Rp 34.62 2.744	1	Rp 49.82 9.000	1	Rp 13.33 4.000	1	Rp 1.740 .000	1	Rp 8.464 .000	1	Rp -	1	Rp 3.130 .000	1	Rp 10.20 4.000	2	Rp 60.03 3.000	33 %	Rp 10.00 5.500	Dina s Pert ania n dan Pan gan
		3	2	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediaka n	2	Rp 37.68 5.934	2	Rp 16.20 0.000	2	Rp 8.800 .000	0	Rp -	1	Rp 5.600 .000	1	Rp 1.800 .000	1	Rp 1.400 .000	2	Rp 7.400 .000	4	Rp 23.60 0.000	67 %	Rp 3.933 .333	Dina s Pert ania n dan Pan gan



		3	27	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Rp 62.809.890	12	Rp 24.000.000	12	Rp 12.000.000	0	Rp -	4	Rp 9.000.000	4	Rp 3.000.000	4	Rp -	12	Rp 12.000.000	24	Rp 36.000.000	400%	Rp 6.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Rp 278.418.527	12	Rp 751.206.380	12	Rp 959.402.000	1	Rp 137.009.500	3	Rp 397.564.900	5	Rp 217.933.100	3	Rp 206.544.800	12	Rp 752.507.500	24	Rp 1.503.713.880	400%	Rp 250.618.980	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Rp 11.273.570	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 15.000.000	1	Rp -	1	Rp 15.000.000	2	Rp 30.000.000	33%	Rp 5.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Rp 200.000.000	-	Rp -	1 keg	Rp 356.600.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1 keg	Rp 354.825.935	1 keg	Rp 354.825.935	1 keg	Rp 354.825.935	17%	Rp 59.137.656	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp 100.000.000	-	Rp -	-	Rp -	0	-	0	-	0	-	0	-	-	Rp -	-	Rp -	0%	Rp -	Dinas Pertanian dan Pangan



								yang Disediaka n																					
		3	2 7	0 1	2 0 7	0 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka n	1	Rp 100.0 00.00 0	-	Rp -	1 unit	Rp 356.6 00.00 0	0	-	0	-	0	-	1 unit	354.8 25.93 5	1 unit	Rp 354.8 25.93 5	1 unit	Rp 354.8 25.93 5	17 %	Rp 59.13 7.656	Dina s Pert ania n dan Pan gan
		3	2 7	0 1	2 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Terlaksan anya Penyediaa n Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	2	Rp 275.1 07.31 8	2	Rp 2.622 .822. 486	3	Rp 2.704 .710. 878	2	Rp 622.0 35.76 5	3	Rp 662.1 10.77 7	2	Rp 609.3 36.28 1	2	Rp 757.6 79.51 0	3	Rp 1.284 .146. 542	5	Rp 3.906 .969. 028	83 %	Rp 651.1 61.50 5	Dina s Pert ania n dan Pan gan
		3	2 7	0 1	2 0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	1	Rp 4.831 .530	1	Rp 3.000 .000	1	Rp 3.200 .000	0	Rp -	1	Rp 2.340 .000	0	Rp -	0	Rp 860.0 00	1	Rp 2.340 .000	2	Rp 5.340 .000	33 %	Rp 890.0 00	Dina s Pert ania n dan Pan gan
		3	2 7	0 1	2 0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	1	Rp 270.2 75.78 8	1	Rp 142.8 58.40 6	1	Rp 165.5 56.54 8	1	Rp 18.93 9.765	1	Rp 27.92 9.897	1	Rp 35.98 5.301	1	Rp 58.28 2.240	1	Rp 82.85 4.963	2	Rp 225.7 13.36 9	33 %	Rp 37.61 8.895	Dina s Pert ania n dan Pan gan



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024

		3	2	0	2	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Rp 3.260.316.444	1	Rp 2.476.964.080	1	Rp 2.535.954.330	1	Rp 603.096.000	1	Rp 631.840.880	1	Rp 573.350.980	1	Rp 698.537.270	1	Rp 1.808.287.860	2	Rp 4.285.251.940	33 %	Rp 714.208.657	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	2	0	2	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Rp 319.245.062	9	Rp 1.184.786.029	6	Rp 440.005.456	1	Rp 95.112.500	1	Rp 179.980.800	1	Rp 75.985.000	3	Rp 88.493.400	6	Rp 275.093.300	15	Rp 1.459.879.329	25 0 %	Rp 243.313.222	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	2	0	2	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	Rp 240.255.882	5	Rp 453.678.450	5	Rp 430.585.456	1	Rp 95.112.500	1	Rp 179.980.800	1	Rp 75.985.000	2	Rp 79.073.400	5	Rp 351.078.300	10	Rp 804.756.750	16 7 %	Rp 134.126.125	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	2	0	2	0	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Rp 28.989.180	1	Rp 23.700.000	1	Rp 9.420.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 9.420.000	1	Rp -	2	Rp 23.700.000	33 %	Rp 3.950.000	Dinas Pertanian dan Pangan



		3	27	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2	Rp 50.000.000	3	Rp 707.407.579	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	-	Rp -	3	Rp 707.407.579	50 %	Rp 117.901.263	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produktivitas Pertanian :		Rp 17.743.991.050		Rp 423.643.700		Rp 661.688.000		Rp 19.750.000		Rp 43.364.300		Rp 240.204.000		Rp 302.23.700		Rp 605.542.000		Rp 1.029.185.700	Rp 171.530.950	Dinas Pertanian dan Pangan	
								Padi Sawah (kw/ha)	32,48		122,17		30,61		27,10		29,94		29,24				86,28						
								Padi Ladang (kw/ha)	21,17		76,59		19,95		19,02		19,17		19,30				57,49						
								Jagung (kw/ha)	23,29		305,40		21,95		43,71		46,58		43,00				133,29						

Halaman | 25



								Lada (kw/ha)	6,39		4,93		6,02		120, 00		119, 00		12 1,3 9		120, 160		480, 55							
								Jumlah Pemotong an Ternak:																						
								Sapi (ekor)	844, 00		837		819, 00		94,0 0		683, 00						777, 00							
								Kambing (ekor)	286, 00		185		282, 00		26,0 0		197, 00						223, 00							
								Babi (ekor)	1.92 8,00		1.91 3		1.90 0,00		237, 00		462, 00						699, 00							
								Ayam Buras (ekor)	39.3 40,0 0		934. 533		38.7 56,0 0		13.1 34,0 0		19.3 37,0 0						32.4 71,0 0							
								Ayam Ras Pedaging (ekor)	1.03 9.70 0,00		268. 107		1.03 3.48 7,00		252. 055, 00		241. 974, 00						494, 029, 00							



								Ayam Ras Petelur (ekor)	238, 00		233		234, 00		106, 00		10,0 0					116, 00							
								Itik (ekor)	379, 00		436		377, 00		212, 00		55,0 0					267, 00							
								Itik manila (ekor)	764, 00		635		759, 00		230, 00		430, 00					660, 00							
		3	2 7	0 2	2 · 0 1		Pengawasa n Penggunaa n Sarana Pertanian	Persentas e Sarana Pertanian yang dimanfaat kan denganba ik	90%	Rp 187.4 04.80 0	80%	Rp 21.53 5.000	75%	Rp 397.9 60.00 0	0,14 %	Rp 750.0 00	0,52 %	Rp 2.725 .000	31, 01 %	Rp 163.2 00.00 0	43,4 9%	Rp 230.7 29.50 0	75,1 5%	Rp 166.6 75.00 0	155 %	Rp 188.2 10.00 0	26 %	Rp 31.36 8.333	Dina s Pert ania n dan Pan gan
		3	2 7	0 2	2 · 0 1	0 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawas an Penggunaa n Sarana Pendukun g Pertanian Sesuai dengan Komoditas , Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	Rp 94.80 0.000	100 pokt an	Rp 14.41 3.000	100 pokt an	Rp 390.9 60.00 0	-	Rp -	-	Rp 1.650 .000	-	Rp 163.2 00.00 0	100 pokt an	Rp 225.6 49.50 0	100 pokt an	Rp 164.8 50.00 0	100 pokt an	Rp 179.2 63.00 0	16 67 %	Rp 29.87 7.167	Dina s Pert ania n dan Pan gan



		3	27	02	201	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	Rp 92.604.800	100 poktan	Rp 7.122.000	100 poktan	Rp 7.000.000	-	Rp 750.000	-	Rp 1.075.000	-	Rp -	100 poktan	Rp 5.080.000	100 poktan	Rp 1.825.000	100 poktan	Rp 8.947.000	1667%	Rp 1.491.167	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	02	202		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pada sektor pertanian	75%	Rp 15.087.520.000	75%	Rp 290.231.800	92%	Rp 128.956.000	13,55%	Rp 19.000.000	17,27%	Rp 24.198.800	58,49%	Rp 62.989.000	7,18%	Rp 22.645.100	96,49%	Rp 106.187.800	171%	Rp 396.419.600	29%	Rp 66.069.933	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	02	202	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	Rp 14.641.000.000	1150 ekor	Rp 33.149.800	1150 ekor	Rp 77.716.000	-	Rp -	-	Rp 23.123.800	-	Rp 37.229.000	1150 ekor	Rp 17.285.100	1150 ekor	Rp 60.352.800	1150 ekor	Rp 93.502.600	19167%	Rp 15.583.767	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	02	202	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	911	Rp 446.520.000	5907 bibit	Rp 257.082.000	4000 bibit	Rp 51.240.000	-	Rp 19.000.000	-	Rp 1.075.000	-	Rp 25.760.000	4000 bibit	Rp 5.360.000	4000 bibit	Rp 45.835.000	5907 bibit	Rp 302.917.000	98450%	Rp 50.486.167	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	02	203		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	Persentase Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	85%	Rp 237.916.250	75%	Rp 20.465.300	76%	Rp 17.621.200	0,00%	Rp -	29,47%	Rp 6.833.700	23,25%	Rp 5.390.000	23,04%	Rp 5.340.600	75,76%	Rp 12.223.700	151%	Rp 32.689.000	25%	Rp 5.448.167	Dinas Pertanian dan Pangan



							Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Ternak bermutu yang digunaka n																				gan	
		3	2	0	2	0	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawas an Mutu Benih/Bibi t Ternak, Bahan Pakan/Pak an/Tanam an Skala Kecil	1	Rp 118.958.125	5 jenis	Rp 13.221.300	5 jenis	Rp 9.336.500	-	Rp -	-	Rp 3.068.000	-	Rp 3.850.000	5 jenis	Rp 2.395.600	5 jenis	Rp 6.918.000	5 jenis	Rp 20.139.300	83 %	Rp 3.356.550	Dina s Pertanian dan Pan gan
		3	2	0	2	0	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan , Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawas an Bahan Pakan/Pak an, Benih/Bibi t Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1	Rp 118.958.125	4 toko	Rp 7.244.000	4 toko	Rp 8.284.700	-	Rp -	-	Rp 3.765.700	-	Rp 1.540.000	4 toko	Rp 2.945.000	4 toko	Rp 5.305.700	4 toko	Rp 12.549.700	67 %	Rp 2.091.617	Dina s Pertanian dan Pan gan
		3	2	0	2	0	Pengawasa n Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah usaha obat hewan yang diawasi	10	Rp 35.000.000	5 toko	Rp 4.216.000	5 toko	Rp 1.528.000	-	Rp -	-	Rp 318.000	-	Rp -	5 toko	Rp 1.199.000	5 toko	Rp 318.000	5 toko	Rp 4.534.000	83 %	Rp 755.667	Dina s Pertanian dan Pan gan
		3	2	0	2	0	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksa an Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1	Rp 35.000.000	5 toko	Rp 4.216.000	5 toko	Rp 1.528.000	-	Rp -	-	Rp 318.000	-	Rp -	5 toko	Rp 1.199.000	5 toko	Rp 318.000	5 toko	Rp 4.534.000	83 %	Rp 755.667	Dina s Pertanian dan Pan gan



		3	27	02	206		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Persentase kelompok tani yang telah mendapat bantuan benih/bibit ternak	52%	Rp 2.196.150.000	50%	Rp 87.195.600	51%	Rp 115.622.800	0,00%	Rp -	4,10%	Rp 9.288.800	3,80%	Rp 8.625.000	18,66%	Rp 42.309.500	26,56%	Rp 17.913.800	77%	Rp 105.109.400	13%	Rp 17.518.233	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	02	206	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakan dari Daerah Kabupaten /Kota Lain	900	Rp 2.196.150.000	9 paket	Rp 87.195.600	9 paket	Rp 115.622.800	-	Rp -	-	Rp 9.288.800	-	Rp 8.625.000	9 paket	Rp 42.309.500	9 paket	Rp 17.913.800	9 paket	Rp 105.109.400	150%	Rp 17.518.233	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian berdasarkan kebutuhan	100%	Rp 52.745.896.000	100%	Rp 20.258.123.309	100%	Rp 18.476.057.000	0,37%	Rp 61.419.200	0,65%	Rp 131.980.700	1,99%	Rp 339.651.236	95,27%	Rp 17.601.491.137	98,28%	Rp 18.134.542.273	198%	Rp 38.392.665.582	33%	Rp 6.398.777.597	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	03	201		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang terselenggara dengan baik	85%	Rp 819.896.000	75%	Rp 26.779.400	78%	Rp 132.377.000	15,14%	Rp 15.524.200	11,31%	Rp 18.651.100	19,21%	Rp 16.153.000	47,46%	Rp 80.543.100	93,12%	Rp 50.328.300	168%	Rp 77.107.700	28%	Rp 12.851.283	Dinas Pertanian dan Pangan



		3	27	03	201	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	Rp 819.896.000	176 paket	Rp 26.779.400	136 paket	Rp 132.377.000	-	Rp 15.524.200	-	Rp 18.651.100	-	Rp 16.153.000	136 paket	Rp 80.543.100	136 paket	Rp 50.328.300	176 paket	Rp 77.107.700	2933%	Rp 12.851.283	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	03	202		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dibangun	79%	Rp 51.926.000.000	70%	Rp 20.231.343.909	72%	Rp 18.343.680.000	0,19%	Rp 45.895.000	0,41%	Rp 113.329.600	1,32%	Rp 323.498.236	68,77%	Rp 17.520.948.037	70,70%	Rp 18.003.670.873	141%	Rp 38.235.014.782	23%	Rp 6.372.502.464	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	03	202	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	19	Rp 10.678.500.000	12 paket	Rp 2.897.624.402	12 paket	Rp 2.469.501.000	-	Rp -	-	Rp 21.176.000	-	Rp 8.885.000	12 paket	Rp 2.261.027.350	12 paket	Rp 30.061.000	12 paket	Rp 2.927.685.402	200%	Rp 487.947.567	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	03	202	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Rp 10.078.500.000	1 paket	Rp 99.663.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	1 paket	Rp 99.663.000	17%	Rp 16.610.500	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	03	202	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	130	Rp 30.969.000.000	119 paket	Rp 15.602.548.813	119 paket	Rp 15.214.729.000	-	Rp 45.895.000	-	Rp 84.537.600	-	Rp 310.603.236	119 paket	Rp 14.616.794.026	119 paket	Rp 441.035.836	119 paket	Rp 16.043.584.649	2433%	Rp 2.673.930.775	Dinas Pertanian dan Pangan



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024

		3	27	03	202	08	Pembanguna n, Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungn ya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamata n serta Sarana Pendukun gnya yang Dibangun, Direhabilit asi dan Dipelihara	1	Rp 200.0 00.00 0	3 unit	Rp 1.463 .605. 694	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	3 unit	Rp 1.463 .605. 694	50 %	Rp 243.9 34.28 2	Dina s Pert ania n dan Pan gan		
		3	27	03	202	09	Pembanguna n, Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilit asi dan Dipelihara	20	Rp 4.000 .000. 000	4 pake t	Rp 167.9 02.00 0	4 pake t	Rp 659.4 50.00 0	-	Rp -	-	Rp 7.616 .000	-	Rp 4.010 .000	4 pake t	Rp 643.1 26.66 1	4 pak et	Rp 11.62 6.000	4 pake t	Rp 179.5 28.00 0	67 %	Rp 29.92 1.333	Dina s Pert ania n dan Pan gan
		3	27	04			PROGRA M PENGEND ALIAN KESEHAT AN HEWAN DAN KESEHAT AN MASYARA KAT VETERIN ER	Persentas e Penuruna n kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5%	Rp 351.0 00.00 0	5%	Rp 235.9 68.00 0	6%	Rp 291.6 84.00 0	0,00 %	Rp -	1,61 %	Rp 26.38 5.000	1,28 %	Rp 20.98 8.900	4,93 %	Rp 239.5 19.30 0	7,82 %	Rp 286.8 93.20 0	13%	Rp 522.8 61.20 0	2 %	Rp 87.14 3.533	Dina s Pert ania n dan Pan gan
		3	27	04	201		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam	Persentas e fasilitasi penanggu langan bencana	85%	Rp 161.0 00.00 0	80%	Rp 211.2 89.00 0	81%	Rp 250.7 05.00 0	0,00 %	Rp -	27,8 1%	Rp 19.35 8.000	12,64 %	Rp 8.793 .900	70,6 6%	Rp 218.7 15.30 0	111, 11%	Rp 28.15 1.900	108 %	Rp 239.4 40.90 0	18 %	Rp 39.90 6.817	Dina s Pert ania n dan Pan gan



							Daerah Kabupaten/ Kota																						
		3	27	04	201	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	23	Rp 161.000.000	23 kec (300 ekor)	Rp 211.289.000	23 kec (300 ekor)	Rp 223.419.000	-	Rp -	-	Rp 8.345.000	-	Rp 7.893.900	23 kec (300 ekor)	Rp 203.671.000	23 kec (300 ekor)	Rp 16.238.900	23 kec (904 ekor)	Rp 227.527.900	15067%	Rp 37.921.317	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	04	201	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	23 kec	Rp 130.000.000	0	Rp -	23 kec	Rp 27.286.000	-	Rp -	-	Rp 11.013.000	-	Rp 900.000	23 kec	Rp 15.044.300	23 kec	Rp 11.913.000	23 kec	Rp 11.913.000	383%	Rp 1.985.500	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	04	202		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan yang diawasi	100 %	Rp 70.000.000	0%	Rp -	100 %	Rp 5.371.000	0,00 %	Rp -	16,29%	Rp 1.025.000	0,00 %	Rp -	80,26%	Rp 4.311.000	96,55%	Rp 1.025.000	96,55%	Rp 1.025.000	16 %	Rp 170.833	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	04	202	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan	23	Rp 70.000.000	-	Rp -	23 keg	Rp 5.371.000	-	Rp -	-	Rp 1.025.000	-	Rp -	23 keg	Rp 4.311.000	23 keg	Rp 1.025.000	23 keg	Rp 1.025.000	383%	Rp 170.833	Dinas Pertanian dan Pangan



								Produk Hewan																					
		3	27	04	204		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah lokasi unit usaha yang diawasi	5	Rp 120.000.000	3 kec	Rp 24.679.000	3 kec	Rp 35.608.000	-	Rp -	-	Rp 6.002.000	-	Rp 12.195.000	3 kec	Rp 16.493.000	3 kec	Rp 18.197.000	3 kec	Rp 42.876.000	50 %	Rp 7.146.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	04	204	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	23	Rp 65.000.000	22 unit	Rp 16.304.000	22 unit	Rp 26.632.000	-	Rp -	-	Rp 2.653.000	-	Rp 11.995.000	22 unit	Rp 11.105.600	22 unit	Rp 14.648.000	22 unit	Rp 30.952.000	367 %	Rp 5.158.667	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	04	204	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	23	Rp 55.000.000	12 pelaku usaha	Rp 8.375.000	12 pelaku usaha	Rp 8.976.000	-	Rp -	-	Rp 3.349.000	-	Rp 200.000	12 pelaku usaha	Rp 5.387.400	12 pelaku usaha	Rp 3.549.000	12 pelaku usaha	Rp 11.924.000	200 %	Rp 1.987.333	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana pertanian yang dapat dikendalikan	85%	Rp 832.100.000	41%	Rp 44.252.000	42%	Rp 95.245.200	0,16 %	Rp 300.000	11,77 %	Rp 27.755.700	5,11 %	Rp 11.737.800	23,05 %	Rp 52.268.000	40,08 %	Rp 92.061.500	41%	Rp 136.313.500	7 %	Rp 22.718.917	Dinas Pertanian dan Pangan



		3	2	0	2		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Bencana pertanian yang ditanggulangi	85%	Rp 832.100.000	41%	Rp 44.252.000	42%	Rp 95.245.200	0,16%	Rp 300.000	11,7%	Rp 27.755.700	5,11%	Rp 11.737.800	23,05%	Rp 52.268.000	40,08%	Rp 39.793.500	41%	Rp 84.045.500	7%	Rp 14.007.583	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	2	0	2	0	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	23	Rp 277.000.000	23 kec	Rp 7.127.000	23 kec	Rp 10.775.000	-	Rp -	-	Rp 2.282.500	-	Rp 1.200.000	23 kec	Rp 7.147.500	23 kec	Rp 3.482.500	23 kec	Rp 10.609.500	383%	Rp 1.768.250	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	2	0	2	0	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	23	Rp 285.000.500	23 kec	Rp 29.997.000	23 kec	Rp 81.245.200	-	Rp -	-	Rp 24.398.200	-	Rp 10.537.800	23 kec	Rp 43.270.500	23 kec	Rp 34.936.000	23 kec	Rp 64.933.000	383%	Rp 10.822.167	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	2	0	2	0	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan,	Jumlah Penanggulan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan,	23	Rp 270.099.500	23 kec	Rp 7.128.000	23 kec	Rp 3.225.000	-	Rp 300.000	-	Rp 1.075.000	-	Rp -	23 kec	Rp 1.850.000	23 kec	Rp 1.375.000	23 kec	Rp 8.503.000	383%	Rp 1.417.167	Dinas Pertanian dan Pangan



							Peternakan dan Kesehatan Hewan	Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan																					
		3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelayanan rekomendasi izin usaha pertanian yang terfasilitasi	100 %	Rp 558.000.000	34%	Rp 145.524.058	34%	Rp 206.709.800	3,81 %	Rp 8.525.000	9,85 %	Rp 29.045.600	1,30 %	Rp 25.751.000	6,56 %	Rp 137.591.382	21,53 %	Rp 200.912.982	56%	Rp 346.437.040	9 %	Rp 57.739.507	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	06	201		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang terbit izin usaha pertaniannya	1	Rp 558.000.000	7 Perusahaan	Rp 145.524.058	7 Perusahaan	Rp 206.709.800	-	Rp 8.525.000	-	Rp 29.045.600	-	Rp 25.751.000	7 Perusahaan	Rp 137.591.382	7 Perusahaan	Rp 63.321.600	7 Perusahaan	Rp 208.845.658	117 %	Rp 34.807.610	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	06	201	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	19	Rp 558.000.000	7 Perusahaan	Rp 145.524.058	7 Perusahaan	Rp 206.709.800	-	Rp 8.525.000	-	Rp 29.045.600	-	Rp 25.751.000	7 Perusahaan	Rp 137.591.382	7 Perusahaan	Rp 63.321.600	7 Perusahaan	Rp 208.845.658	117 %	Rp 34.807.610	Dinas Pertanian dan Pangan
		3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani tingkat madya	0,47 %	Rp 400.000.000	0,27 %	Rp 517.562.800	0,27 %	Rp 629.000.000	0,00 %	Rp -	0,04 %	Rp 89.559.000	0,06 %	Rp 142.788.000	0,14 %	Rp 333.882.940	0,24 %	Rp 566.229.940	1%	Rp 1.083.792.740	0 %	Rp 180.632.123	Dinas Pertanian dan Pangan



		3	27	07	201		Pelaksanaa n Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok	1.76 9	Rp 400.0 00.00 0	1.50 3	Rp 517.5 62.80 0	1.50 3	Rp 629.0 00.00 0	-	Rp -	-	Rp 89.55 9.000	-	Rp 142.7 88.00 0	1.50 3	Rp 333.8 82.94 0	1.50 3	Rp 232.3 47.00 0	1.50 3	Rp 749.9 09.80 0	25 05 0 %	Rp 124.9 84.96 7	Dina s Pert ania n dan Pan gan
		3	27	07	201	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaa n Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembag aan Penyuluha n Pertanian di Kecamata n dan Desa yang Ditingkatk an Kapasitasn ya	14	Rp 200.0 00.00 0	14 BPP	Rp 279.6 46.20 0	14 BPP	Rp 480.5 10.00 0	-	Rp -	-	Rp 44.57 3.000	-	Rp 127.8 78.00 0	14 BPP	Rp 245.3 92.25 0	14 BPP	Rp 172.4 51.00 0	14 BPP	Rp 452.0 97.20 0	23 3%	Rp 75.34 9.533	Dina s Pert ania n dan Pan gan
		3	27	07	201	02	Pengembang an Kapasitas Kelembagaa n Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembag aan Petani di Kecamata n dan Desa yang Ditingkatk an Kapasitasn ya	14	Rp 200.0 00.00 0	1 pokt an	Rp 237.9 16.60 0	1 pokt an	Rp 148.4 90.00 0	-	Rp -	-	Rp 44.98 6.000	-	Rp 14.91 0.000	1 pokt an	Rp 88.49 0.690	1 pokt an	Rp 59.89 6.000	1 pokt an	Rp 297.8 12.60 0	17 %	Rp 49.63 5.433	Dina s Pert ania n dan Pan gan
Jumlah										Rp 89.68 3.542 .900	240, 15%	Rp 42.50 0.246 .874		Rp 41.45 2.910 .909		Rp 4.435 .413. 599		Rp 6.865 .957. 590		Rp 5.280 .317. 498		Rp 23.93 1.251 .889		Rp 40.51 2.940 .576					
Rata-rata capaian kinerja (%)																10,70 %		16,56 %		12,74 %		57,73 %		97,73 %					
Predikat kinerja																0		6,50 %		8,32 %		1616, 64%		1632, 86%					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													



Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

*) Diisi oleh
Kepala BIDANG
PERENCANAAN
BAPPEDA



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu disajikan pada tabel berikut :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Indikator		SPM/ Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat daerah						Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		-	√	4,98	5,18	5,38	5,58	5,78	5,98	2,24	2,71	2,71	5,58	5,78	
	1.	Skor PPH	-	√	69,56	72	74	76	78	80	68,15	80,9	87,2	80	78	
	2.	Jumlah Produksi Pertanian	-	√												
		Padi Sawah (ton)	-	√	25.346	26.119	26.641	27.174	27.718	28.272	59.121,48	22.677	21.035	27.174	27.718	
		Padi Ladang (ton)	-	√	29.506	30.661	31.274	31.900	32.538	33.188		23.839	20.955	31.900	32.538	
		Jagung (ton)	-	√	263,81	1.126	1.149	1.171	1.195	1.219	3.279,47	6.023	15.884	1.171	1.195	
		Ubi Kayu (ton)	-	√	8.678,18	18.625	18.998	19.377	19.765	20.160	11.524,94	8.765	42.248	19.377	19.765	
		Cabe (ton)	-	√	230,52	236,29	241,01	245,83	250,75	255,76	234,12	449,59	234,11	245,83	250,75	
		Bawang Merah (ton)	-	√	3,65	3,71	3,78	3,86	3,94	4,01	0,2	0,12	0,15	3,86	3,94	
		Jahe (ton)	-	√	179,79	184,28	187,97	191,72	195,56	199,47		187,31	79,06	191,72	195,56	
		Sapi (kilo)	-	√	121.863,00	123.081,63	124.312,45	125.555,57	126.811,13	128.079,24	121.863	127.023,00	128.237	125.555,57	126.811,13	
		Kambing (kilo)	-	√	3.951,00	3.970,76	3.990,61	4.010,56	4.030,61	4.050,77	3.951	2.620,00	3.752	4.010,56	4.030,61	
		Babi (kilo)	-	√	77.027,00	77.412,14	77.799,20	78.188,19	78.579,13	78.972,03	77.027	78.337,00	51.761	78.188,19	78.579,13	
		Ayam Buras (kilo)	-	√	54.263,00	54.425,79	54.589,09	54.752,83	54.917,09	55.081,84	54.263	382.349,00	419.625	54.752,83	54.917,09	



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024

		Ayam Ras Pedaging (kilo)	-	√	1.574.928,00	1.582.802,64	1.590.716,65	1.598.670,24	1.606.663,59	1.614.696,91	1.572.418	1.426.500,00	1.420.357	1.598.670,24	1.606.663,59	
		Ayam Ras Petelur (kilo)			-	326,00	326,65	327,31	327,96	328,62		326,00	1.476	327,31	327,96	
		Itik (kilo)	-	√	533	534,07	535,13	536,2	537,28	538,35	1.977	619	859	536,2	537,28	
		Itik manila (kilo)	-	√	1.444,00	1.446,89	1.449,78	1.452,68	1.455,59	1.458,50		1.231,00	1.818	1.452,68	1.455,59	
		Telur Ayam Buras (kilo)	-	√	10.294,00	10.315,00	10.397,20	10.449,18	10.501,43	10.553,94		10.293,84	10.932,84	10.449,18	10.501,43	
		Telur Ayam Ras Petelur (kilo)	-	√	13.326,00	13.593,00	14.062,26	14.132,57	14.203,24	14.274,25		13.325,68	13.325,68	14.132,57	14.203,24	
		Kelapa Sawit (ton)	-	√	1.094.205	1.117.063	1.139.921	1.162.778	1.185.636	1.208.494	519.531,17	868.520	1.152.802,50	1.162.778	1.185.636	
		Karet (ton)	-	√	19	19.776	20.369	20.980	21.610	22.258	12.681	12.627	12.243	20.980	21.610	
		Kopi (ton)	-	√	1,22	1,26	1,29	1,33	1,37	1,41	1,22	0,48	1,15	1,33	1,37	
		Lada (ton)	-	√	12,1	12,46	12,84	13,22	13,62	14,03	12,1	11,85	10,85	13,22	13,62	
2		Predikat SAKIP Kabupaten Kapuas Hulu	-	√	B	BB	BB	BB	BB	A	BB	BB	-	BB	BB	
	1.	Predikat SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu	-	√	BB	BB	BB	A	A	A	BB	B	-	A	A	





2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas pokok Dinas Pertanian dan Pangan adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pertanian dan Bidang Pangan berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas meliputi urusan pertanian dan pangan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan urusan Dinas Pertanian dan Pangan disajikan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 2.3

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Urusan SKPD

No.	Tugas, Fungsi dan Kewenangan Urusan Dinas Pertanian dan Pangan	Permasalahan
1.	Perumusan kebijakan di bidang Pertanian dan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan	Sistem penyediaan Database belum tertata dan kurang terpadu antar unit kerja, sehingga bahan untuk perumusan kebijakan kurang memadai.
2.	Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian dan Pangan	Koordinasi dengan instansi vertikal sudah cukup baik, tetapi koordinasi internal di lingkup OPD masih lemah, sehingga menghambat penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
3.	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Pertanian dan Pangan	Manajemen internal di lingkup OPD baik manajemen organisasi, SDM maupun pengelolaan asset masih lemah, sehingga menghambat pelaksanaan tugas.
4.	Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan	1. Ketersediaan pangan belum mencukupi kebutuhan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG). 2. Cadangan pangan di tingkat pemerintah dan di tingkat rumah tangga belum terpantau. 4. Pemantauan dan penanganan penduduk rawan pangan belum maksimal. 5. Pola konsumsi pangan masyarakat belummenuhi target SPM. 6. Pemantauan dan pengendalian distribusi, harga dan pasokan bahan pangan belum terpadu dengan instansi terkait. 7. Cakupan pengawasan keamanan panganmasih perlu ditingkatkan.



5.	Penyelenggaraan urusan pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana penunjang sektor pertanian2. Peningkatan produksi komoditas pertanian dan peternakan terkendala penurunan luas lahan fungsional pertanian.3. Produk hasil pertanian masih kurang berdaya saing di era perdagangan bebas.4. Penjaminan kesehatan hewan dan produk Bahan Asal Hewan (BAH) mutlak dilakukan sebagai kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat.5. Keterbatasan sarana dan prasarana Produksi pertanian.
----	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kinerja perangkat daerah, sebagaimana tercermin dari hasil evaluasi terhadap SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan pada tahun 2023 dengan predikat ‘BB’, yang mana masih perlu dilakukan perbaikan namun tidak bersifat mendasar. Kendala ini disebabkan beberapa program/kegiatan yang telah ditetapkan masih belum dikendalikan dengan baik, belum mengacu pada target kinerja, keterbatasan pengetahuan aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan dan indikator kinerjanya, belum disusunnya pedoman tentang penyusunan dokumen perencanaan di Daerah.
2. Berkaitan dengan permasalahan Ketahanan Pangan masih ada kaitannya dengan permasalahan nasional, dimana sistem cadangan dan distribusi pangan serta rantai pasokan dan logistik nasional belum terintegrasi dengan baik, sementara jumlah produksi pertanian lokal masih belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan utama.
3. Berkaitan dengan upaya peningkatan produksi di sektor Pertanian masih mengalami kendala dalam penyediaan sarana produksi pertanian yang dapat menunjang proses teknologi budidaya, dimana kecenderungannya bantuan sarana produksi selalu datang diwaktu yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan.
4. Kondisi Lahan Pertanian yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu ini memiliki kecenderungan dengan pola yang masih tersebar/ tidak dalam satu hamparan. Sehingga kesulitan dalam memfasilitasi prasarana untuk menunjang produksi pertanian.



- 5. Dalam Kaitannya dengan Penanggulangan Penyakit Hewan dan ternak masih mengalami kendala dan permasalahan dalam hal ketersediaan vaksin untuk mengatasi penyakit ternak yang menular dan beberapa kejadian luar biasa seperti Rabies. Selain itu juga keterbatasan Sumber Daya Manusia yang bisa terlibat dalam menangani masalah penyakit ternak.
- 6. Masih terbatasnya/ belum tersedianya sarana pelayanan yang memenuhi standar hygiene-sanitasi (RPH-RPU) dan RPH yang ada belum bisa dimanfaatkan sehingga pengawasan kesmavet belum optimal.
- 7. Sumber daya manusia masih menjadi kendala dan permasalahan yang utama dalam memberikan pembinaan dan pendampingan. Jumlah Penyuluh pertanian yang ada masih belum bisa optimal dibandingkan dengan luas lahan pertanian.

2.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Menggunakan Analisis SWOT

Isu-isu strategis tidak bisa terlepas dari keberhasilan pembangunan Dinas Pertanian dan Pangan yang telah dicapai hingga saat ini. Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisa terhadap kondisi lingkungan internal berupa kekuatan (Strength) dan kelemahan (weakness), serta memperhatikan kondisi eksternal berupa peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Analisis internal ini bertujuan untuk memetakan kekuatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dalam potensi pembangunan, serta mengenali dan memahami kelemahan dan kekurangan agar dapat meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan, sedangkan Analisis eksternal untuk memetakan peluang dan ancaman yang akan dihadapi Dinas Pertanian dan Pangan.

Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut digunakan metode Analisis SWOT, sebagai berikut:

Tabel 3.3

Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman)

LINGKUNGAN INTERNAL	
KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
1. Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.	1. Kondisi Lahan pertanian yang masih tersebar/ tidak dalam satu hamparan. 2. Pengaruh perubahan iklim terhadap penurunan produksi tanaman serta serangan berbagai hama penyakit tanaman.



<div>2. Adanya Komitmen Pimpinan untuk Peningkatan Produksi Sektor Pertanian.</div> <div>3. Ketersediaan dana yang diperoleh oleh Dinas Pertanian dan Pangan baik dana yang bersumber dari alokasi APBD, APBD Provinsi dan APBN</div> <div>4. Kualitas aparatur dalam aspek tingkat pendidikan dan pengalaman kerja.</div> <div>5. Tersedianya Komoditas Unggulan di Sektor Pertanian.</div>	<div>3. Penanganan desa rawan pangan di Kabupaten Kapuas Hulu belum dapat dilakukan secara efektif.</div> <div>4. Kurangnya Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan yang Lengkap, baik dan cenderung mahal.</div> <div>5. Kecenderungannya Masyarakat Belum dapat memanfaatkan lahan pertanian secara optimal.</div> <div>6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Bandingkan Ruang Lingkup Dinas Pertanian dan Pangan yang luas dan beragam.</div> <div>7. Pertumbuhan Produksi yang Masih Fluktuatif.</div> <div>8. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan yang berkualitas.</div>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINGKUNGAN EKSTERNAL

PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN (THREATS)
<div>1. Potensi areal Pertanian di Kabupaten Kapuas Hulu untuk Perluasan Areal Pertanian.</div> <div>2. Terjalinnya hubungan yang baik antara Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan instansi - instansi vertikal terkait serta mitra kerja (petani, pelau agribisnis, penyedia saprodi, dll).</div> <div>3. Kebutuhan pangan yang semakin meningkat dan beragam seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk.</div> <div>4. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bahan pangan sehat.</div> <div>5. Segmen pasar untuk produk – produk pertanian masih terbuka luas.</div>	<div>1. Penurunan Produksi/ Produktivitas Sektor Pertanian.</div> <div>2. Alih fungsi lahan mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian produktif oleh berbagai kepentingan.</div> <div>3. Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) seperti hama dan penyakit.</div> <div>4. Dampak dari perubahan iklim yang menimbulkan potensi bencana alam seperti banjir.</div> <div>5. Kemandirian petani yang masih rendah dimana pola pikir petani masih berorientasi bantuan sehingga sulit untuk mandiri serta Sulitnya petani menerima inovasi dan</div>



6. Adanya inovasi teknologi dan informasi untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas pertanian.	teknologi pertanian.
7. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan bidang pertanian.	6. Rendahnya minat generasi muda untuk bertani.
8. Dukungan Pemerintah Pusat terkait Pendanaan APBN.	

Berdasarkan Analisis SWOT dengan Faktor Internal dan Eksternal yang sudah diidentifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- 1. Startegis S – O yaitu strategis yang menggunakan Kekuatan untuk meraih Peluang.
- 2. Strategis W – O yaitu strategis yang menekan Kelemahan untuk meraih Peluang.
- 3. Strategis S – T yaitu strategis yang menggunakan Kekuatan untuk menghadapi Ancaman.
- 4. Strategis W – T yaitu strategis yang menekan Kelemahan untuk menghadapi Ancaman.

Berdasarkan interaksi pemetaan faktor-faktor internal dan eksternal, maka dapat dituangkan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.4
Strategis Faktor Analisis SWOT

STRATEGIS (S – O)	STRATEGIS (W – O)
1. Tanggung jawab dan komitmen pimpinan dalam meningkatkan produksi sektor pertanian.	1. Pemanfaatan potensi lahan pertanian untuk menghasilkan produksi pertanian yang baik dan berkualitas.
2. Optimalisasi pengembangan komoditas unggulan di sektor pertanian.	2. Pemanfaatan lahan pertanian secara optimal yang disebabkan perubahan iklim terhadap peningkatan hasil pertanian.
3. Optimalisasi kebutuhan pangan masyarakat serta peningkatan kesadaran akan pentingnya bahan pangan sehat.	3. Penanganan penurunan jumlah desa rawan pangan di Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Peningkatkan inovasi teknologi dan informasi baru bagi petani dalam meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas pertanian.	4. Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Sektor Pertanian.
	5. Meningkatkan kualiatas aparatur untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan



5. Optimalisasi ketersediaan dana yang diperoleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan.	pentingnya mengkonsumsi bahan pangan sehat, serta membuka peluang pasar di bidang pertanian.
	6. Peningkatan jumlah produksi sektor pertanian.
STRATEGIS (S – T)	STRATEGIS (W – T)
1. Penerapan inovasi dan teknologi informasi yang baru dengan dukungan dari pemerintah dalam menunjang kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan.	1. Pemanfaatan lahan pertanian secara optimal yang disebabkan perubahan iklim terhadap peningkatan hasil produksi/produktivitas pertanian.
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana sektor pertanian untuk hasil pertanian yang bermutu dan berdaya saing.	2. Optimalisasi serangan OPT dan kondisi perubahan iklim yang menimbulkan potensi bencana seperti banjir, hama dan penyakit.
3. Pembukaan lapangan kerja disektor pertanian sehingga dapat menumbuhkan minta masyarakat maupun generasi muda untuk berusaha dibidang pertanian.	3. Peningkatan kesejahteraan petani.
4. Mewujudkan kemandirian petani agar dapat berswasembada yang berkelanjutan.	4. Pemberdayaan dan penanggulangan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan.
5. Pengendalian terhadap serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) agar tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis.	5. Pembukaan lapangan kerja disektor pertanian sehingga dapat menumbuhkan minta masyarakat maupun generasi muda untuk berusaha dibidang pertanian.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran program – program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “Kerangka Regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada Perangkat Daerah, sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogram, dapat dimanfaatkan antara lain : forum musyawarah koordinasi perencanaan seperti : MUSRENBANGPROP di tingkat Propinsi, MUSRENBANGDA di tingkat Kabupaten/Kota, MUSRENBANG Kecamatan, MUSRENBANG tingkat Desa dan MUSRENBANGNAS di tingkat Daerah, forum – forum lintas pelaku, dan konsultasi publik.

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 merupakan acuan bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan.

Masyarakat luas dapat berperan serta seluas – luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang – undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program – program pembangunan yang berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program – program pembangunan;

Dalam membuat Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah wajib melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan Pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhannya masing – masing. Pada akhir tahun anggaran 2023, Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan – peraturan lainnya;

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil – hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.





2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan pada tabel berikut :

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					No.	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kab. Kapu as Hulu	Persentase ketersediaan energi perkapita	206 0,88	Ang ka	Rp 690.464.000	1.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kab. Kapu as Hulu	Persentase ketersediaan energi perkapita	2060, 88	Angk a	Rp 690.464.000
				57,0 4	Ang ka						57,04	Angk a	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Kapu as Hulu	Persentase kebutuhan pangan daerah dengan ketersediaan dan penyaluran pangan	75	%	Rp 123.163.000		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Kapu as Hulu	Persentase kebutuhan pangan daerah dengan ketersediaan dan penyaluran pangan	75	%	Rp 123.163.000
	- Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kab. Kapu as Hulu	Terlaksananya Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	2	dok	Rp 25.370.000		- Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kab. Kapua s Hulu	Terlaksananya Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	2	dok	Rp 25.370.000



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024

	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1	keg	Rp	16.118.000		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1	keg	Rp	16.118.000
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	1	dok	Rp	81.675.000		Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	1	dok	Rp	81.675.000
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	25	ton	Rp	500.000.000		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	25	ton	Rp	500.000.000
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10	ton	Rp	500.000.000		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10	ton	Rp	500.000.000
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Kapuas Hulu	Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai AKG	80	%	Rp	67.301.000		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Kapuas Hulu	Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai AKG	80	%	Rp	67.301.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi	15	Poktan	Rp	67.301.000		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman	15	Poktan	Rp	67.301.000



	Lokal		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					Sumber Daya Lokal		Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					
2.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kab. Kapuas Hulu	Persentase kerawanan pangan yang ditindaklanjuti	100	%	Rp	26.837.800	2.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kab. Kapuas Hulu	Persentase kerawanan pangan yang ditindaklanjuti	100	%	Rp	26.837.800
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya Laporan Situasi Pangan dan Gizi Tingkat Kecamatan	1	dok	Rp	26.837.800		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya Laporan Situasi Pangan dan Gizi Tingkat Kecamatan	1	dok	Rp	26.837.800
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	dok	Rp	26.837.800		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	dok	Rp	26.837.800
3.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pangan segar yang layak konsumsi	10	jenis	Rp	26.806.500	3.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pangan segar yang layak konsumsi	10	jenis	Rp	26.806.500
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah pangan segar daerah layak konsumsi	7	jenis	Rp	26.806.500		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah pangan segar daerah layak konsumsi	7	jenis	Rp	26.806.500
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	7	jenis	Rp	26.806.500		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	7	jenis	Rp	26.806.500



										a			
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kapu as Hulu	NILAI SAKIP DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	88,5	Ang ka	Rp 20.780.628.215	4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kapu as Hulu	NILAI SAKIP DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	88,5	Angk a	Rp 20.780.628.215
		Kab. Kapu as Hulu	NILAI IKM DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	81,5	Ang ka				Kab. Kapu as Hulu	NILAI IKM DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	81,5	Angk a	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapu as Hulu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26	dok	Rp 208.520.900		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapu as Hulu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26	dok	Rp 208.520.900
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kapu as Hulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dok	Rp 61.442.500		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kapua s Hulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dok	Rp 61.442.500
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Kapu as Hulu	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	dok	Rp 4.972.000		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Kapua s Hulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok	Rp 4.972.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kapu as Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1	dok	Rp 7.472.000		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kapua s Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	1	dok	Rp 7.472.000



			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kapu as Hulu	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	dok	Rp	11.447.000		- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kapua s Hulu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	dok	Rp 11.447.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Kapu as Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	dok	Rp	10.982.000		- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Kapua s Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	dok	Rp 10.982.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapu as Hulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	dok	Rp	22.984.000		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapua s Hulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	dok	Rp 22.984.000



	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	dok	Rp	89.221.400		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	dok	Rp	89.221.400
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14	dok	Rp	17.142.913.964		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14	dok	Rp	17.142.913.964
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144	Orang	Rp	16.583.480.364		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144	Orang	Rp	16.583.480.364
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dok	Rp	499.680.000		- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dok	Rp	499.680.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dok	Rp	27.736.800		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dok	Rp	27.736.800
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan	1	dok	Rp	32.016.800		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	1	dok	Rp	32.016.800



	SKPD		Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					SKPD		SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7	dok	Rp 12.902.000		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7	dok	Rp 12.902.000
	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	dok	Rp 1.070.000		- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	dok	Rp 1.070.000
	- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4	dok	Rp 6.262.000		- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4	dok	Rp 6.262.000
	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	dok	Rp 5.570.000		- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	dok	Rp 5.570.000



	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Tersusunnya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8	dok	Rp	136.413.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Tersusunnya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8	dok	Rp	136.413.000
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	org	Rp	750.000		- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	org	Rp	750.000
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	dok	Rp	130.663.000		- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	dok	Rp	130.663.000
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	dok	Rp	5.000.000		- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	dok	Rp	5.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	31	dok	Rp	441.090.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	31	dok	Rp	441.090.000
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	Rp	5.705.000		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	Rp	5.705.000
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Kapuas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1	paket	Rp	6.470.000		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1	paket	Rp	6.470.000



Kantor	Hulu	Kantor yang Disediakan					Kantor		Kantor yang Disediakan				
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	Rp	21.595.600	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	Rp	21.595.600
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	Rp	13.334.000	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	Rp	13.334.000
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	dok	Rp	8.800.000	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	dok	Rp	8.800.000
- Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	lap	Rp	6.000.000	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	lap	Rp	6.000.000
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	lap	Rp	367.185.400	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	lap	Rp	367.185.400
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	dok	Rp	12.000.000	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	dok	Rp	12.000.000



	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kapu as Hulu	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	kegiat an	Rp	3.000.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kapu as Hulu	Terlaksananya a Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	kegia tan	Rp	3.000.000
	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kapu as Hulu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Pak et	Rp	3.000.000		- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kapua s Hulu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Paket	Rp	3.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapu as Hulu	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	lap ora n	Rp	2.622.169.268		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapu as Hulu	Terlaksananya a Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	lapor an	Rp	2.622.169.268
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kapu as Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	lapo ran	Rp	3.200.000		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kapua s Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	lapor an	Rp	3.200.000
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kapu as Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	lapo ran	Rp	166.668.000		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kapua s Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	lapor an	Rp	166.668.000
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kapu as Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1	lapo ran	Rp	2.452.301.268		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kapua s Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1	lapor an	Rp	2.452.301.268



			Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9	Unit	Rp	213.619.083		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya a Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9	Unit	Rp	213.619.083
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	unit	Rp	209.589.083		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	unit	Rp	209.589.083
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	paket	Rp	2.030.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	paket	Rp	2.030.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	Rp	2.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	Rp	2.000.000
5.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah produktivitas pertanian			Rp	490.271.600	5.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah produktivitas pertanian			Rp	490.271.600
			Padi Sawah	31,2	kw/ha						Padi Sawah	31,22	kw/ha		



				2									
			Padi Ladang	20,35	kw/ha					Padi Ladang	20,35	kw/ha	
			Jagung	22,39	kw/ha					Jagung	22,39	kw/ha	
			Ubi Kayu	271,77	kw/ha					Ubi Kayu	271,77	kw/ha	
			Cabe	29,19	kw/ha					Cabe	29,19	kw/ha	
			Bawang Merah	9,64	kw/ha					Bawang Merah	9,64	kw/ha	
			Jahe	170,78	kw/ha					Jahe	170,78	kw/ha	
			Kelapa Sawit	136,29	kw/ha					Kelapa Sawit	136,29	kw/ha	
			Karet	5,83	kw/ha					Karet	5,83	kw/ha	
			Kopi	4,78	kw/ha					Kopi	4,78	kw/ha	
			Lada	6,14	kw/ha					Lada	6,14	kw/ha	
			Jumlah Pemotongan Ternak:							Jumlah Pemotongan Ternak:			
			Sapi	827,00	ekor					Sapi	827,00	ekor	
			Kambing	283,00	ekor					Kambing	283,00	ekor	
			Babi	1.909,00	ekor					Babi	1.909,00	ekor	
			Ayam Buras	38.949,00	ekor					Ayam Buras	38.949,00	ekor	



			Ayam Ras Pedaging	1.035.554,00	ekor					Ayam Ras Pedaging	1.035.554,00	ekor			
			Ayam Ras Petelur	235,00	ekor					Ayam Ras Petelur	235,00	ekor			
			Itik	377,00	ekor					Itik	377,00	ekor			
			Itik Manila	761,00	ekor					Itik Manila	761,00	ekor			
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Sarana Pertanian yang dimanfaatkan dengan baik	84	%	Rp	344.728.000		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Sarana Pertanian yang dimanfaatkan dengan baik	84	%	Rp	344.728.000
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	kegiatan	Rp	342.253.000		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	kegiatan	Rp	342.253.000
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	kegiatan	Rp	2.475.000		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	kegiatan	Rp	2.475.000
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Kab. Kapuas Hulu	Persentase pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pada sektor pertanian	76	%	Rp	21.501.000		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Kab. Kapuas Hulu	Persentase pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pada sektor pertanian	76	%	Rp	21.501.000



	Kabupaten/Kota							Kabupaten/Kota						
	- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	kegiatan	Rp	19.026.000	- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	kegiatan	Rp	19.026.000
	- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	kegiatan	Rp	2.475.000	- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	kegiatan	Rp	2.475.000
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak bermutu yang digunakan	79	%	Rp	12.839.000	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak bermutu yang digunakan	79	%	Rp	12.839.000
	- Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1	kegiatan	Rp	12.026.500	- Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1	kegiatan	Rp	12.026.500
	- Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1	kegiatan	Rp	812.500	- Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1	kegiatan	Rp	812.500



	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah usaha obat hewan yang diawasi	7	unit usaha	Rp	1.565.000		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah usaha obat hewan yang diawasi	7	unit usaha	Rp	1.565.000
	- Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1	kegiatan	Rp	1.565.000		- Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1	kegiatan	Rp	1.565.000
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Kapuas Hulu	Persentase kelompok tani yang telah mendapat bantuan benih/bibit ternak	53	%	Rp	109.638.600		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Kapuas Hulu	Persentase kelompok tani yang telah mendapat bantuan benih/bibit ternak	53	%	Rp	109.638.600
	- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakandari Daerah Kabupaten/Kota Lain	900	Ekor Benih/Bibit Ternak	Rp	109.638.600		- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakandari Daerah Kabupaten/Kota Lain	900	Ekor Benih/Bibit Ternak	Rp	109.638.600
6.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian berdasarkan kebutuhan	100	%	Rp	28.726.253.000	6.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian berdasarkan kebutuhan	100	%	Rp	28.726.253.000
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Persentase prasarana pertanian yang terselenggara dengan baik	11	%	Rp	579.367.000		Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Persentase prasarana pertanian yang terselenggara dengan baik	11	%	Rp	579.367.000



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024

	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	keg	Rp	450.772.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	keg	Rp	450.772.000
	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1	dok	Rp	980.000		Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1	dok	Rp	980.000
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1	dok	Rp	1.115.000		Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1	dok	Rp	1.115.000
	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1	dok	Rp	126.500.000		Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1	dok	Rp	126.500.000
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Persentase prasarana pertanian yang dibangun	157	bua h	Rp	28.146.886.000		Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Persentase prasarana pertanian yang dibangun	157	bua h	Rp	28.146.886.000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi	1	bua h	Rp	178.024.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun,	1	bua h	Rp	178.024.000



	Pertanian		dan Dipelihara					Pertanian		Direhabilitasi dan Dipelihara					
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Kapuas Hulu	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	125	buah	Rp	23.002.536.000	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Kapuas Hulu	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	125	buah	Rp	23.002.536.000	
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	buah	Rp	132.000.000	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	buah	Rp	132.000.000	
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12	buah	Rp	438.350.000	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12	buah	Rp	438.350.000	
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	18	buah	Rp	4.395.976.000	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	18	buah	Rp	4.395.976.000	
7.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	6	%	Rp	133.435.000	7.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	6	%	Rp	133.435.000
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Kapuas Hulu	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	83	%	Rp	84.030.000		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	83	%	Rp	84.030.000



	Dalam Daerah Kabupaten/Kota							Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	Penanggulangan Daerah - Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	23	kecamatan	Rp 32.250.000		Penanggulan Daerah - Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	23	kecamatan	Rp 32.250.000	
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulan Penyakit Hewan dan Zoonosis	23	kecamatan	Rp 51.780.000		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulan Penyakit Hewan dan Zoonosis	23	kecamatan	Rp 51.780.000	
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase fasilitas penanggulan bencana	100	%	Rp 6.400.000		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase fasilitas penanggulan bencana	100	%	Rp 6.400.000	
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	23	kegiatan	Rp 6.400.000		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	23	kegiatan	Rp 6.400.000	



	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah lokasi unit usaha yang diawasi	5	kec	Rp	43.005.000		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah lokasi unit usaha yang diawasi	5	kec	Rp	43.005.000
	- Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	23	kegiatan	Rp	17.688.000		- Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	23	kegiatan	Rp	17.688.000
	- Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	20	kegiatan	Rp	25.317.000		- Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	20	kegiatan	Rp	25.317.000
8.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Bencana pertanian yang dapat dikendalikan	80	%	Rp	7.169.000	8.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Bencana pertanian yang dapat dikendalikan	80	%	Rp	7.169.000
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Bencana pertanian yang ditanggulangi	100	%	Rp	7.169.000		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Bencana pertanian yang ditanggulangi	100	%	Rp	7.169.000
	- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	23	ha	Rp	2.250.000		- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	23	ha	Rp	2.250.000



	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	23	ha	Rp	2.420.000		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	23	ha	Rp	2.420.000
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	23	kec	Rp	2.499.000		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	23	kec	Rp	2.499.000
9.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Kab. Kapuas Hulu	Persentase pelayanan rekomendasi izin usaha pertanian yang terfasilitasi	100	%	Rp	10.880.600	9.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Kab. Kapuas Hulu	Persentase pelayanan rekomendasi izin usaha pertanian yang terfasilitasi	100	%	Rp	10.880.600
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah perusahaan yang terbit izin usaha pertaniannya	1	perusahaan	Rp	10.880.600		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah perusahaan yang terbit izin usaha pertaniannya	1	perusahaan	Rp	10.880.600
	- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	19	izin usaha pertanian	Rp	10.880.600		- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	19	izin usaha pertanian	Rp	10.880.600



10.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kab. Kapu as Hulu	Jumlah kelompok tani tingkat madya	1	Kel om pok Tani	Rp	205.950.000	10.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kab. Kapu as Hulu	Jumlah kelompok tani tingkat madya	1	Kelo mpok Tani	Rp	205.950.000
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Kapu as Hulu	Cakupan bina kelompok	169 9	ora ng	Rp	205.950.000		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Kapu as Hulu	Cakupan bina kelompok	1699	oran g	Rp	205.950.000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan - Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Kapu as Hulu	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	14	BP P	Rp	114.828.000		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan - Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Kapu as Hulu	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	14	BPP	Rp	114.828.000
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Kapu as Hulu	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	13	kelo mpo k tani	Rp	91.122.000		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Kapu as Hulu	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	13	kelom pok tani	Rp	91.122.000
						Rp	51.098.695.715							Rp	51.098.695.715





2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam membangun pertanian di kabupaten Kapuas Hulu harus terus ditingkatkan. Melalui MUSRENBANG Tingkat Kecamatan diperoleh usulan-usulan dari masyarakat yang dikoordinir oleh BAPPEDA. Dengan kondisi seperti ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024 dapat selaras dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu. Penyelarasan ini juga diarahkan dengan program dan kebijakan pembangunan pertanian di tingkat Propinsi dan Pusat.

Berdasarkan data hasil usulan masyarakat untuk Program dan Kegiatan di Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024. Kegiatan – kegiatan yang diusulkan mengarah pada program – program prioritas yaitu Program Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara hirarki, rumusan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan hasil perpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, propinsi dan kebijakan spesifik lokal yang digali dari berbagai potensi dan masalah spesifik lokal. Dengan demikian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan, walaupun bersifat otonom, namun masih bersifat komplementer, suplementer, dan integratif.

Atas dasar konsepsi dimaksud maka penetapan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 merupakan hasil perpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, propinsi dan kebijakan spesifik lokal Kabupaten Kapuas Hulu.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan

3.2.1 Tujuan Renja Dinas Pertanian Pangan

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam menyusun pembangunan pertanian selama 1 (Satu) tahun kedepan. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian yaitu tersusunnya sasaran strategis, program dan kegiatan selama 1 (Satu) tahun.

Sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanian dan Pangan, maka misi yang didukung capaiannya adalah :

1. Misi Nomor 2 yaitu “Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi”.
2. Misi Nomor 4 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas



Adapun tujuan yang telah dirumuskan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Rencana Strategis yang disusun untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga tercapainya tujuan untuk mendukung sasaran pada RPJMD adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah

Tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

3.2.2 Sasaran Renja Dinas Pertanian Pangan

Sasaran merupakan internal dalam proses perencanaan Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat capai orientasi pada hasil dan dapat dicapai pada periode tertentu. Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (Lima) tahun periode 2021 - 2026 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran, indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan barometer/ tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran sebagai berikut:

Tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemberdayaan petani melalui peningkatan produksi komoditi potensial sektor pertanian.

Tujuan Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat ditabel 4.1 sebagai berikut :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun-				
							2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah		LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		Persen	4,98	5,18	5,38	5,58	5,78	5,98
	1.1	Meningkatnya pemberdayaan petani melalui peningkatan produksi komoditi potensial sektor pertanian.	1.	Skor PPH	Angka	69,56	78	79	80	81	82
			2.	Jumlah Produksi Pertanian							
				Padi Sawah	Ton	25.346	26.119,00	26.641,38	27.174,21	27.717,69	28.272,05
				Padi Ladang	Ton	29.506	30.661,00	31.274,22	31.899,70	32.537,70	33.188,45
				Jagung	Ton	263,81	1.126,00	1.148,52	1.171,49	1.194,92	1.218,82
				Ubi Kayu	Ton	8.678,18	18.625,00	18.997,50	19.377,45	19.765,00	20.160,30
				Cabe	Ton	230,52	236,29,00	241,01	245,83	250,75	255,76
				Bawang Merah	Ton	3,65	3,71	3,78	3,86	3,94	4,01
				Jahe	Ton	179,79	184,28	187,97	191,72	195,56	199,47
				Sapi	Kilo	121.863,00	123.081,63	124.312,45	125.555,57	126.811,13	128.079,24
				Kambing	Kilo	3.951,00	3.970,76	3.990,61	4.010,56	4.030,61	4.050,77
				Babi	Kilo	77.027,00	77.412,14	77.799,20	78.188,19	78.579,13	78.972,03
				Ayam Buras	Kilo	54.263,00	54.425,79	54.589,09	54.752,83	54.917,09	55.081,84
				Ayam Ras Pedaging	Kilo	1.574.928,00	1.582.802,64	1.590.716,65	1.598.670,24	1.606.663,59	1.614.696,91
				Ayam Ras Petelur	Kilo	-	326,00	326,65	327,31	327,96	328,62
				Itik	Kilo	533,00	534,07	535,13	536,20	537,28	538,35
				Itik manila	Kilo	1.444,00	1.446,89	1.449,78	1.452,68	1.455,59	1.458,50
				Telur Ayam Buras	Kilo	10.294,00	10.345,47	10.397,20	10.449,18	10.501,43	10.553,94
				Telur Ayam Ras Petelur	Ton	800.867	303.801	318.991	334.940	351.687	369.272
				Kelapa Sawit	Ton	1.094.205,47	1.117.062,78	1.139.920,57	1.162.778,35	1.185.636,14	1.208.493,92



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024

				Karet	Ton	19,200	19.776	20.369,28	20.980,36	21.609,77	22.258,06
				Kopi	Ton	1,22	1,26	1,29	1,33	1,37	1,41
				Lada	Ton	12,10	12,46	12,84	13,22	13,62	14,03
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			Predikat SAKIP Kabupaten KapuasHulu		Predikat	B	BB	BB	BB	A
	2.1	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu		1.	Predikat SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Pangan Kab. Kapuas Hulu		Predikat	BB	BB	BB	A



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan mengacu pada tujuan dan sasaran dalam upaya pencapaian visi dan misi Bupati Kapuas Hulu khususnya dalam pencapaian peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian untuk tahun 2024. Selain itu juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani dengan melalui peningkatan produksi hasil pertanian.

Tujuan terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui peningkatan daya saing sektor pertanian memiliki sasaran, sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Petani Melalui Peningkatan Produksi Komoditi Potensial Sektor Pertanian untuk mendukung sasaran ini dilaksanakan melalui 9 program dan 16 kegiatan yang diantaranya adalah :

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - 1.1 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
 - 1.1.3 Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
 - 1.2 Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 1.3 Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - 1.3.1 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - 1.1 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan



3. Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - 1.1 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - 1.1 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - 1.2 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 - 1.2.2 Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
 - 1.3 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
 - 1.4 Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
 - 1.6 Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 1.1 Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
 - 1.1.3 Sub Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
 - 1.1.4 Sub Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
 - 1.2 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya



- 1.1.1 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
- 1.1.2 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- 1.1.3 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
- 1.1.4 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- 1.1.5 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- 6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 1.1 Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2 Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
 - 1.3 Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
- 7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - 1.1 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - 1.1.3 Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 8. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - 1.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota



1.1.1 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

9. Program Penyuluhan Pertanian

1.1 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

1.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

1.1.2 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Sasaran 2: Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi Dan Sistem Layanan Terintegrasi, Serta Pelayanan Sederhana.

Untuk mencapai sasaran 2 diarahkan pada peningkatan nilai reformasi birokrasi dan predikat SAKIP yang mana untuk mendukung sasaran ini dilaksanakan melalui 1 program dan 8 kegiatan yang diantaranya adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Program ini dijabarkan kedalam kegiatan yang diantaranya :

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD"

1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

1.1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD"

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

1.1.2 Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD



- 1.1.3 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 1.1.3 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.1.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.1.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.1.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.1.6 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.1.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.1.8 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.1.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.2 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikasi pendanaan program dan kegiatan didasarkan kepada program dan kegiatan yang efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau stakeholder terkait.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator pendanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.2 yang termuat pada lampiran.





Tabel 5.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN KAPUAS HULU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2	09	02			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan energi perkapita	Kab. Kapuas Hulu	2060,88	Angka	Rp 690.464.000	APBD		2100,00	Angka Rp 724.987.200	
								57,04	Angka				57,00	Angka	
2	09	02	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase kebutuhan pangan daerah dengan ketersediaan dan penyaluran pangan	Kab. Kapuas Hulu	75	%	Rp 123.163.000	APBD		77	% Rp 129.321.150	
2	09	02	2.01	0008	- Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	2	dok	Rp 25.370.000	APBD		2	dok Rp 26.638.500	
2	09	02	2.01	0012	- Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Kapuas Hulu	1	keg	Rp 16.118.000	APBD		1	keg Rp 16.923.900	
2	09	02	2.01	0015	- Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Terlaksananya Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	1	dok	Rp 81.675.000	APBD		1	dok Rp 85.758.750	



2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	25	ton	Rp	500.000.000	APBD		37,5	ton	Rp	525.000.000
2	09	03	2.02	0003	- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	10	ton	Rp	500.000.000	APBD		15	ton	Rp	525.000.000
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai AKG	Kab. Kapuas Hulu	80	%	Rp	67.301.000	APBD		82	%	Rp	70.666.050
2	09	03	2.04	0002	- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Kapuas Hulu	15	Poktan	Rp	67.301.000	APBD		20	Poktan	Rp	70.666.050
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kerawanan pangan yang ditindaklanjuti	Kab. Kapuas Hulu	100	%	Rp	26.837.800	APBD		100	%	Rp	28.179.690
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Laporan Situasi Pangan dan Gizi Tingkat Kecamatan	Kab. Kapuas Hulu	1	dok	Rp	26.837.800	APBD		1	dok	Rp	28.179.690
2	09	04	2.01	0001	- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kab. Kapuas Hulu	1	dok	Rp	26.837.800	APBD		1	dok	Rp	28.179.690
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Pangan segar yang layak konsumsi	Kab. Kapuas Hulu	10	jenis	Rp	26.806.500	APBD		10	jenis	Rp	28.146.825



2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar daerah layak konsumsi	Kab. Kapuas Hulu	7	jenis	Rp	26.806.500	APBD		10	jenis	Rp	28.146.825
2	09	05	2.01	0007	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	7	jenis	Rp	26.806.500	APBD		7	jenis	Rp	28.146.825
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Kab. Kapuas Hulu	88,5	Angka	Rp	20.780.628.215	APBD		89	Angka	Rp	21.822.059.626
						NILAI IKM DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Kab. Kapuas Hulu	81,5	Angka					82	Angka		
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	26	dok	Rp	208.520.900	APBD		26	dok	Rp	218.946.945
3	27	01	2.01	0001	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	8	dok	Rp	61.442.500	APBD		8	dok	Rp	64.514.625
3	27	1	2.01	0002	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1	dok	Rp	4.972.000	APBD		1	dok	Rp	5.220.600



3	27	01	2.01	0003	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1	dok	Rp	7.472.000	APBD		1	dok	Rp	7.845.600
3	27	1	2.01	0004	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2	dok	Rp	11.447.000	APBD		2	dok	Rp	12.019.350
3	27	01	2.01	0005	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2	dok	Rp	10.982.000	APBD		2	dok	Rp	11.531.100
3	27	01	2.01	0006	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	4	dok	Rp	22.984.000	APBD		4	dok	Rp	24.133.200
3	27	1	2.01	0007	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	8	dok	Rp	89.221.400	APBD		8	dok	Rp	93.682.470
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan	Kab. Kapuas Hulu	14	dok	Rp	17.142.913.964	APBD		14	dok	Rp	18.000.059.662

Halaman | 87



3	27	01	2.03	0004	- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	4	dok	Rp	6.262.000	APBD		4	dok	Rp	6.575.100
3	27	01	2.03	0005	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2	dok	Rp	5.570.000	APBD		2	dok	Rp	5.848.500
3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	8	dok	Rp	136.413.000	APBD		8	dok	Rp	143.233.650
3	27	01	2.05	0002	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kapuas Hulu	1	org	Rp	750.000	APBD		1	org	Rp	787.500
3	27	01	2.05	0003	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	6	dok	Rp	130.663.000	APBD		6	dok	Rp	137.196.150
3	27	01	2.05	0011	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kapuas Hulu	1	dok	Rp	5.000.000	APBD		1	dok	Rp	5.250.000
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kapuas Hulu	31	dok	Rp	441.090.000	APBD		31	dok	Rp	465.544.500



3	27	01	2.06	0001	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1	paket	Rp	5.705.000	APBD		1	paket	Rp	5.990.250
3	27	1	2.06	0002	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1	paket	Rp	6.470.000	APBD		1	paket	Rp	6.793.500
3	27	1	2.06	0003	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1	paket	Rp	21.595.600	APBD		1	paket	Rp	22.675.380
3	27	1	2.06	0005	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1	paket	Rp	13.334.000	APBD		1	paket	Rp	14.000.700
3	27	01	2.06	0006	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	2	dok	Rp	8.800.000	APBD		2	dok	Rp	9.240.000
3	27	1	2.06	0008	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kapuas Hulu	12	lap	Rp	6.000.000	APBD		12	lap	Rp	6.300.000
3	27	01	2.06	0009	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	12	lap	Rp	367.185.400	APBD		12	lap	Rp	385.544.670
3	27	01	2.06	0011	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1	dok	Rp	12.000.000	APBD		1	dok	Rp	15.000.000



3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kapuas Hulu	1	kegiatan	Rp	3.000.000	APBD		1	kegiatan	Rp	3.150.000
3	27	01	2.07	0001	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1	Paket	Rp	3.000.000	APBD		1	Paket	Rp	3.150.000
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	3	laporan	Rp	2.622.169.268	APBD		3	laporan	Rp	2.753.277.731
3	27	1	2.08	0001	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu	1	laporan	Rp	3.200.000	APBD		1	laporan	Rp	3.360.000
3	27	01	2.08	0002	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1	laporan	Rp	166.668.000	APBD		1	laporan	Rp	175.001.400
3	27	1	2.08	0004	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1	laporan	Rp	2.452.301.268	APBD		1	laporan	Rp	2.574.916.331
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	9	Unit	Rp	213.619.083	APBD		11	Unit	Rp	224.300.037



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024

3	27	01	2.09	0001	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kapuas Hulu	5	unit	Rp	209.589.083	APBD		5	unit	Rp	220.068.537
3	27	1	2.09	0006	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	1	paket	Rp	2.030.000	APBD		2	paket	Rp	2.131.500
3	27	1	2.09	0009	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kapuas Hulu	3	unit	Rp	2.000.000	APBD		4	unit	Rp	2.100.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produktivitas pertanian	Kab. Kapuas Hulu			Rp	490.271.600	APBD				Rp	514.785.180
						Padi Sawah		31,22	kw/ha					31,85	kw/ha		
						Padi Ladang		20,35	kw/ha					20,76	kw/ha		
						Jagung		22,39	kw/ha					22,84	kw/ha		
						Ubi Kayu		271,77	kw/ha					277,21	kw/ha		
						Cabe		29,19	kw/ha					29,78	kw/ha		
						Bawang Merah		9,64	kw/ha					9,84	kw/ha		
						Jahe		170,78	kw/ha					174,20	kw/ha		
						Kelapa Sawit		136,29	kw/ha					139,02	kw/ha		
						Karet		5,83	kw/ha					5,94	kw/ha		
						Kopi		4,78	kw/ha					4,87	kw/ha		



						Lada		6,14	kw/ha				6,26	kw/ha	
						Jumlah Pemotongan Ternak:									
						Sapi		827,00	ekor				836,00	ekor	
						Kambing		283,00	ekor				285,00	ekor	
						Babi		1.909,00	ekor				1.919,00	ekor	
						Ayam Buras		38.949,00	ekor				39.144,00	ekor	
						Ayam Ras Pedaging		1.035.554,00	ekor				1.037.625,00	ekor	
						Ayam Ras Petelur		235,00	ekor				237,00	ekor	
						Itik		377,00	ekor				378,00	ekor	
						Itik Manila		761,00	ekor				762,00	ekor	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang dimanfaatkan dengan baik	Kab. Kapuas Hulu	84	%	Rp 344.728.000	APBD		86	%	Rp 361.964.400
3	27	02	2.01	0001	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Kapuas Hulu	1	kegiatan	Rp 342.253.000	APBD		1	kegiatan	Rp 359.365.650
3	27	02	2.01	0002	- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	1	kegiatan	Rp 2.475.000	APBD		1	kegiatan	Rp 2.598.750



3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pada sektor pertanian	Kab. Kapuas Hulu	76	%	Rp	21.501.000	APBD		79	%	Rp	22.576.050
3	27	02	2.02	0002	- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kapuas Hulu	1	kegiatan	Rp	19.026.000	APBD		1	kegiatan	Rp	19.977.300
3	27	02	2.02	0003	- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kapuas Hulu	1	kegiatan	Rp	2.475.000	APBD		1	kegiatan	Rp	2.598.750
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak bermutu yang digunakan	Kab. Kapuas Hulu	79	%	Rp	12.839.000	APBD		82	%	Rp	13.480.950
3	27	02	2.03	0001	- Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Kapuas Hulu	1	kegiatan	Rp	12.026.500	APBD		1	kegiatan	Rp	12.627.825
3	27	02	2.03	0002	- Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Kab. Kapuas Hulu	1	kegiatan	Rp	812.500	APBD		1	kegiatan	Rp	853.125
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah usaha obat hewan yang diawasi	Kab. Kapuas Hulu	7	unit usaha	Rp	1.565.000	APBD		8	unit usaha	Rp	1.643.250



3	27	02	2.04	0001	- Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Kab. Kapuas Hulu	1	kegiatan	Rp	1.565.000	APBD		1	kegiatan	Rp	1.643.250
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase kelompok tani yang telah mendapat bantuan benih/bibit ternak	Kab. Kapuas Hulu	53	%	Rp	109.638.600	APBD		53	%	Rp	115.120.530
3	27	02	2.06	0003	- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakandari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Kapuas Hulu	900	Ekor Benih/Bibit Ternak	Rp	109.638.600	APBD		900 Ekor Benih/Bibit Ternak	Ekor Benih/Bibit Ternak	Rp	115.120.530
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian berdasarkan kebutuhan	Kab. Kapuas Hulu	100	%	Rp	28.726.253.000	APBD		100	%	Rp	30.162.565.650
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang terselenggara dengan baik	Kab. Kapuas Hulu	11	%	Rp	579.367.000	APBD		12	%	Rp	608.335.350
3	27	03	2.01	0003	- Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	1	keg	Rp	450.772.000	APBD		1	keg	Rp	473.310.600
3	27	03	2.01	0014	- Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kab. Kapuas Hulu	1	dok	Rp	980.000	APBD		1	dok	Rp	1.029.000



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024

3	27	03	2.01	0016	- Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Kab. Kapuas Hulu	1	dok	Rp	1.115.000	APBD		1	dok	Rp	1.170.750
3	27	03	2.01	0017	- Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	1	dok	Rp	126.500.000	APBD		1	dok	Rp	132.825.000
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dibangun	Kab. Kapuas Hulu	157	buah	Rp	28.146.886.000	APBD		157	buah	Rp	29.554.230.300
3	27	03	2.02	0002	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	1	buah	Rp	178.024.000	APBD		1	buah	Rp	186.925.200
3	27	03	2.02	0003	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	125	buah	Rp	23.002.536.000	APBD		125	buah	Rp	24.152.662.800
3	27	03	2.02	0008	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	1	buah	Rp	132.000.000	APBD		1	buah	Rp	138.600.000
3	27	03	2.02	0009	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	12	buah	Rp	438.350.000	APBD		12	buah	Rp	460.267.500
3	27	03	2.02	0010	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Kab. Kapuas Hulu	18	buah	Rp	4.395.976.000	APBD		18	buah	Rp	4.615.774.800



3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Kab. Kapuas Hulu	6	%	Rp	133.435.000	APBD		6	%	Rp	140.106.750
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Kab. Kapuas Hulu	83	%	Rp	84.030.000	APBD		84	%	Rp	88.231.500
3	27	04	2.01	0003	- Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Kab. Kapuas Hulu	23	kecamatan	Rp	32.250.000	APBD		23	kecamatan	Rp	33.862.500
3	27	04	2.01	0008	- Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Kapuas Hulu	23	kecamatan	Rp	51.780.000	APBD		23	kecamatan	Rp	54.369.000
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Kab. Kapuas Hulu	100	%	Rp	6.400.000	APBD		100	%	Rp	6.720.000
3	27	04	2.02	0004	- Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kab. Kapuas Hulu	23	kegiatan	Rp	6.400.000	APBD		23	kegiatan	Rp	6.720.000



3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah lokasi unit usaha yang diawasi	Kab. Kapuas Hulu	5	kec	Rp	43.005.000	APBD		5	kec	Rp	45.155.250
3	27	04	2.04	0002	- Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kapuas Hulu	23	kegiatan	Rp	17.688.000	APBD		23	kegiatan	Rp	18.572.400
3	27	04	2.04	0010	- Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kapuas Hulu	20	kegiatan	Rp	25.317.000	APBD		22	kegiatan	Rp	26.582.850
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana pertanian yang dapat dikendalikan	Kab. Kapuas Hulu	80	%	Rp	7.169.000	APBD		81	%	Rp	7.527.450
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Bencana pertanian yang ditanggulangi	Kab. Kapuas Hulu	100	%	Rp	7.169.000	APBD		100	%	Rp	7.527.450
3	27	05	2.01	0001	- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Kapuas Hulu	23	ha	Rp	2.250.000	APBD		23	ha	Rp	2.362.500
3	27	05	2.01	0003	- Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Kapuas Hulu	23	ha	Rp	2.420.000	APBD		23	ha	Rp	2.541.000



3	27	05	2.01	0006	- Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kab. Kapuas Hulu	23	kec	Rp	2.499.000	APBD		23	kec	Rp	2.623.950
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelayanan rekomendasi izin usaha pertanian yang terfasilitasi	Kab. Kapuas Hulu	100	%	Rp	10.880.600	APBD		100	%	Rp	11.424.630
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang terbit izin usaha pertaniannya	Kab. Kapuas Hulu	1	perusahaan	Rp	10.880.600	APBD		1	perusahaan	Rp	11.424.630
3	27	06	2.01	0005	- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Kab. Kapuas Hulu	19	izin usaha pertanian	Rp	10.880.600	APBD		19	izin usaha pertanian	Rp	11.424.630
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani tingkat madya	Kab. Kapuas Hulu	1	Kelompok Tani	Rp	205.950.000	APBD		1	Kelompok Tani	Rp	216.247.500
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok	Kab. Kapuas Hulu	1699	orang	Rp	205.950.000	APBD		1734	orang	Rp	216.247.500
3	27	07	2.01	0001	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kapuas Hulu	14	BPP	Rp	114.828.000	APBD		14	BPP	Rp	120.569.400



3	27	07	2.01	0002	- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kapuas Hulu	13	kelompok tani	Rp 91.122.000	APBD		13	kelompok tani	Rp 95.678.100
JUMLAH										Rp 51.098.695.715					Rp 53.656.030.501





BAB V

PENUTUP

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Pertanian dan Pangan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2024, dimana Renja Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan, seluruh aparatur secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2024.

Renja Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Putussibau, Februari 2024

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kapuas Hulu



HASINTUS GUNUNG AGUNG, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19830705 201001 1 023